



Manajemen Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Fikra Hendra Fita^{1,*}

¹ Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: fikrahendrafita.31@gmail.com

Abstract

This study aims to describe how the transportation management of the Bukittinggi City Transportation Agency. The background is that the City of Bukittinggi has received the Wahana Tata Nugraha award for the last 3 years, 2014-2016. The Wahana Tata Nugraha Award is an award given by the Government of the Republic of Indonesia to a city that is able to organize public transportation well. There are several activities that have been carried out well by the City of Bukittinggi City Transportation Service, including public transportation services, freight routes and special bus routes that are clear and equipped with traffic signs. Among these activities, there were problems with parking on the road and inadequate infrastructure. The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The selection of informants was carried out by using purposive sampling technique. The data validity technique used in this study was the accidental sampling technique in accordance with the needs of the researcher and purposive sampling with certain considerations. The research analysis unit uses the institution. The results showed that the Transportation Management carried out by the Bukittinggi City Transportation Agency was basically going well.

Keywords: *Transportation, Transportation Management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen transportasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Dilatarbelakangi dengan Kota Bukittinggi mendapat penghargaan Wahana Tata Nugraha selama 3 tahun terakhir tahun 2014-2016. Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi diantaranya, pelayanan angkutan umum, rute angkutan barang dan jalur khusus bus yang sudah jelas dan dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Diantara kegiatan tersebut, ditemukan permasalahan parkir di badan jalan dan sarana prasarana yang belum memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *accidental sampling* sesuai dengan kebutuhan peneliti dan *purposive sampling*. Unit analisis peneliti gunakan lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Transportasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi pada dasarnya berjalan baik.

Kata kunci: Transportasi, Manajemen Transportasi.

Pendahuluan

Manajemen transportasi secara umum (Nasution: 2008) adalah kegiatan yang dilakukan oleh bagian transportasi atau unit dalam organisasi industri atau perdagangan dan jasa lain untuk memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain secara efektif dan efisien. Jadi, dalam mengawali jalannya suatu sistem manajemen transportasi, dibutuhkan suatu proses awal perencanaan, dilengkapi dengan lembaga dan peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan transportasi, kemudian sumber daya manusia atau aktor penggerak dalam berjalannya rencana yang akan dilaksanakan, kemudian angkutan kota yang membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti penumpang yang membutuhkan kendaraan angkutan, dalam membawa angkutan tentu di butuhnya sarana dan prasarana yang memadai seperti rambu lalu lintas agar tidak terjadi pelanggaran di lalu lintas, tersedianya terminal tempat angkutan kota untuk berhenti dan juga digunakan untuk mencari penumpang, Semua kegiatan tersebut saling terkait satu sama lain dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, baik di bidang transportasi perkotaan maupun transportasi regional antar kota. Terciptanya sistem transportasi atau perhubungan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, murah, dan nyaman merupakan tujuan pembangunan dalam sektor perhubungan transportasi (Ofyar Z Tamin : 2000). Kemacetan lalu lintas, pelayanan transportasi umum yang buruk, polusi udara, dan berbagai macam masalah transportasi lainnya, masalah ini sedikit banyaknya telah menurunkan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan transportasi lain yang terjadi dalam perkotaan antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda kendaraan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perpajakan, dan perambuan lalu lintas. Arus lalu lintas yang identik dengan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap wajar bagi

masyarakat, terutama di wilayah perkotaan (Fidel Miro :2005).

Kemudian, Pemerintah membuat sebuah program yang berguna untuk memotivasi dan mengapresiasi keberhasilan dalam pengelolaan dalam bidang manajemen transportasi di daerah maupun di wilayah kota. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah kegiatan pemberian penghargaan atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini berhasil diraih oleh Kota Bukittinggi dengan kategori sedang selama 3 tahun yaitu dari tahun 2014-2016. Dan juga mendapat anugerah di bidang Angkutan Kota. Tentunya keberhasilan Kota Bukittinggi dalam meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha ini merupakan hasil dari kinerja sector public Kota Bukittinggi.

Namun, walaupun Kota Bukittinggi menerima Piala Wahana Tata Nugraha. Kota Bukittinggi ini masih mempunyai permasalahan terkait dengan manajemen transportasi seperti, Kemacetan di titik jalan tertentu di tempat-tempat wisata, Sarana dan Prasarana yang tidak dimanfaatkan dengan baik seperti tersedianya *fly over* yang ada di Pasar Aur Kuning, Angkutan kota sering menunggu penumpang tidak pada tempat yang seharusnya, banyaknya kendaraan angkutan kota yang berhenti menunggu penumpang di jalanan sehingga menyebabkan kemacetan, dan Kota Bukittinggi sudah menyediakan lahan parkir seperti gedung parkir di Kota Bukittinggi tetapi masih banyak ditemukannya parkir liar di badan jalan. Melihat fenomena yang telah di jelaskan, Peneliti berasumsi bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pengelolaan transportasi belum berjalan dengan baik, meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi meraih penghargaan di bidang kategori angkutan dan lalu lintas.

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran dari Ofyar Z Tamin. Beberapa konsep mengenai Manajemen Kebutuhan Transportasi menurut Ofyar Z. Tamin (2016), Ada 4 konsep yang dijelaskan dalam konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi yaitu Pertama, Dampak Pergeseran Waktu dimana agar proses pergerakan masih dapat dilakukan pada lokasi

yang sama tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, Strategi jam masuk atau keluar kantor atau sekolah yang berbeda-beda, Kebijakan hari kerja tanpa angkutan pribadi dan Batasan waktu pergerakan untuk angkutan barang.

Kedua, Dampak Pergeseran Rute atau Lokasi dimana agar proses pergerakan masih dapat dilakukan pada waktu yang sama, akan tetapi pada rute atau lokasi yang berbeda. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan ini antara lain: Kebijakan *Road Picing*, *Electronic Road Picing*, *Area Licensing Scheme*, Penetapan rute angkutan barang dan Penetapan ruas jalan khusus untuk angkutan umum atau pejalan kaki.

Ketiga, Dampak Pergeseran Moda dimana dibutuhkan agar proses pergerakan masih dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang sama tetapi dengan moda transportasi yang berbeda. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan antara lain : *Car Pooling*, Kebijakan peningkatan pelayanan angkutan umum dan Pergeseran moda transportasi ke moda telekomunikasi.

Keempat, Dampak Pergeseran Lokasi Tujuan merupakan proses pergerakan masih dapat dilakukan pada lokasi, waktu, dan moda transportasi yang sama tetapi dengan lokasi tujuan yang berbeda. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: Upaya mengarahkan pembangunan tata guna lahan dan Penyebaran secara lebih merata lokasi pusat kegiatan utama dan rayonisasi sekolah di daerah perkotaan. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Manajemen Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Peranan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen utama penelitian,

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam membahas hasil penulis menggunakan kerangka pemikiran dari Ofyar Z Tamin. Beberapa konsep mengenai Manajemen Kebutuhan Transportasi menurut Ofyar Z. Tamin (2016), ada 4 konsep yang dijelaskan yaitu:

Pertama, Dampak Pergeseran Waktu merupakan proses pergerakan masih dapat dilakukan pada lokasi yang sama tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. strategi yang dapat dilakukan antara lain: Strategi jam masuk atau keluar kantor atau sekolah yang berbeda-beda, Kebijakan hari kerja tanpa angkutan pribadi dan Batasan waktu pergerakan untuk angkutan barang. Peneliti melakukan observasi dan wawancara ke Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, peneliti melihat adanya perbedaan pernyataan dan ketimpangan informasi yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan. Dinas Perhubungan mengatakan bahwa strategi ini sudah ada sejak tahun 2009, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga mengurangi kemacetan. Dinas Perhubungan berperan dalam pengaturan pengamanan lalu lintas dan penerapan tarif angkutan umum untuk anak sekolah baik orang umum, Namun Dinas Pendidikan mengatakan bahwa tidak ada menerapkan dan mengeluarkan aturan mengenai kegiatan ini, Dinas Pendidikan hanya mengatur terkait dengan kalender pendidikan. Menurut peneliti belum adanya aturan mengenai penetapan strategi ini di Kota Bukittinggi. Meskipun tidak adanya aturan tetapi Pemerintah Kota Bukittinggi tetap menetapkan untuk jam masuk sekolah dan kantoran yang berbeda-beda dan diberlakukan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kegiatan ini diawali dengan pemberitahuan kepada sekolah sekolah kemudian dalam melaksanakan kegiatan ini dilakukan pengawasan di bantu oleh Dinas Perhubungan sebagai pengaman lalu lintas.

Dalam pelaksanaan kegiatan *car free day* berdasarkan surat edaran dari Walikota Bukittinggi, *car free day* mulai efektif dilaksanakan pada awal tahun 2018 dan berjalan baik hingga sampai sekarang..Kegiatan ini dilaksanakan setiap Minggu ke II dan Minggu ke IV setiap bulannya pada Jam 06.30 WIB sampai 11.00 WIB. Menurut peneliti kegiatan ini tidak begitu berdampak kepada pengelolaan Manajemen Transportasi di Kota Bukittinggi mengenai kemacetan yang terjadi. Dalam pelaksanaan kegiatan *car free day* terlihat bahwa beban transportasi berkurang hanya dari pagi hari saja karena didukung dengan pemanfaatan jalan seperti pengalihan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada saat kegiatan dilakukan.

Untuk penentuan batasan waktu untuk pergerakan angkutan barang kurang berjalan dengan baik karena tidak ada petugas yang mengawasinya, dan tidak ada terminal khusus untuk angkutan barang di Kota Bukittinggi sehingga pengawasan di lapangan tidak ada. Pada umumnya peneliti melihat bahwa angkutan barang beroperasi lebih sering pada pagi hari dan malam hari juga melakukan bongkar muat di daerah Bay Pass. Apabila ada kendaraan angkutan barang yang tidak melengkapi administrasi seperti surat perizinan dan uji kelayakan kendaraan maka akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Polres Kota Bukittinggi. Angkutan barang boleh lewat pada jam berapa saja, karena belum ada peraturan mengenai waktu yang pergerakan lewat angkutan barang di Kota Bukittinggi, Perlunya tindakan yang tegas dari Dinas Perhubungan membuat peraturan mengenai batasan pergerakan untuk angkutan barang bertujuan agar kegiatan ini jelas waktu yang akan dilalui, Kemudian juga disediakan fasilitas untuk angkutan barang seperti terminal agar memudahkan dalam melakukan bongkar muat. Dan juga memudahkan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengecekan surat-surat izin kendaraan.

Kedua, Dampak Pergeseran Rute atau Lokasi merupakan proses pergerakan masih dapat dilakukan pada waktu yang sama, akan tetapi pada rute atau lokasi yang berbeda. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: Kebijakan *Road Pricing*, *Electronic Road Pricing*, *Area Licensing Scheme*, Penetapan rute

angkutan barang dan Penetapan ruas jalan khusus untuk angkutan umum atau pejalan kaki. Kota Bukittinggi belum menerapkan sistem Kebijakan *road pricing* seperti sistem stiker, *Electronic Road Pricing (ERP)*, *Area Licensing Scheme (ALS)* karena dengan kategori Kota Sedang belum bisa memenuhi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan ini didukung dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Kemudian dilihat dalam Penentuan rute angkutan barang sudah berjalan dengan baik karena Kota Bukittinggi mempunyai rute-rute tertentu yang dilalui oleh angkutan barang. Kota Bukittinggi juga mempunyai sarana prasarana seperti rambu lalu lintas dan jalan layang yang dilalui oleh angkutan barang pada umumnya. Namun seiring dengan banyaknya populasi dan jumlah penduduk untuk penentuan rute angkutan barang ini ada kendala dengan faktor tersebut sering terjadi kemacetan. Tetapi Kota Bukittinggi mengalami kendala lainnya seperti pengawasan di lapangan belum berjalan dengan baik. Ini akan berdampak kepada pengelolaan Manajemen Transportasi di Kota Bukittinggi. Jika kegiatan ini tidak dilakukan dengan baik maka akan berefek kepada kegiatan transportasi di Kota Bukittinggi seperti angkutan barang yang amburadul masuk kota dan akan mengalami kemacetan. Indikator ini juga berhubungan dengan batasan pergerakan untuk angkutan barang yang belum ada mempunyai aturan serta sarana seperti terminal belum terpenuhi dan pengawasan di lapangan belum ada.

Upaya yang dilakukan Kota Bukittinggi khususnya Dinas Perhubungan dalam mengelola dan memfasilitasi ruas jalan untuk angkutan umum berjalan dengan baik. Kota Bukittinggi telah menyediakan transportasi penunjang seperti angkutan umum untuk mengunjungi berbagai tempat yang ada di Kota Bukittinggi, dan juga dilengkapi dengan rambu lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Namun, Kota Bukittinggi tidak mempunyai jalur khusus angkutan umum, Kota Bukittinggi hanya mempunyai jalur *Mixed Traffic*, Jalur ini tidak dilalui oleh angkutan umum saja tetapi juga sepeda motor, angkutan pribadi dan pejalan kaki. Upaya lain yang dilakukan oleh Kota Bukittinggi seperti menyediakan fasilitas halte dan fasilitas untuk pejalan kaki. Untuk lokasi

naik turunnya penumpang terkhusus untuk halte. Menurut peneliti dalam pembangunan halte tentu sudah dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai lokasinya. Jadi masyarakat yang kurang memanfaatkan halte dengan baik. Kota Bukittinggi khususnya Dinas Perhubungan terkendala oleh dana yang dimiliki terbatas dalam perbaikan fasilitas seperti halte. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi mengharapakan memenuhi dana untuk pembangunan halte yang rusak dan tidak layak pakai agar bisa diperbaiki dan kegiatan ini tentu akan berdampak kepada pemakai fasilitas halte. Terkait dengan angkutan umum yang tidak mematuhi rambu lalu lintas yang sudah ditetapkan dan menunggu penumpang di badan jalan. Menurut peneliti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum.

Ketiga, Dampak Pergeseran Moda agar proses pergerakan masih dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang sama tetapi dengan moda transportasi yang berbeda. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain : *Car Pooling*, Kebijakan peningkatan pelayanan angkutan umum dan Pergeseran moda transportasi ke moda telekomunikasi. Di Kota Bukittinggi strategi *Car Pooling* ini belum terlaksana dengan baik. Pada umumnya strategi ini hanya digunakan untuk anak sekolah seperti TK, dan beberapa SD Swasta karena dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Berdasarkan survei peneliti untuk para karyawan di Kota Bukittinggi pada umumnya memakai kendaraan pribadi dan angkutan umum untuk pergi ke tempat kerja. Menurut peneliti strategi ini hendaknya dapat dilaksanakan dan diterapkan di Kota Bukittinggi dengan penyediaan fasilitas seperti bus untuk karyawan dan beberapa bus sekolah

Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, seperti kelengkapan atribut sopir, sarana prasarana, mengadakan sosialisasi dan pengawasan di lapangan yang berdampak kepada pengelolaan Manajemen Transportasi di Kota Bukittinggi. Namun ada kendala yang dihadapi seperti dengan kehadiran gojek di Kota Bukittinggi karena akan

berdampak kepada pendapatan angkutan umum menurun. Aturan mengenai gojek online ini belum jelas oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan belum bisa bertindak lebih lanjut dalam mengatasi keberadaan gojek online tersebut.

Kemudian, Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi belum sepenuhnya dalam menerapkan kegiatan Pergeseran moda transportasi ke moda telekomunikasi karena masih dalam tahap pembangunan. Namun Kota Bukittinggi telah mempunyai layanan call center atau layanan pengaduan yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan kendala atau keluhan terkait dengan pelayanan angkutan umum atau yang berhubungan dengan transportasi di Kota Bukittinggi. Kemudian dengan adanya gojek akan mempermudah masyarakat dalam menggunakan transportasi tidak perlu jauh-jauh ke tempat biasa menunggu angkutan umum, tetapi apabila masyarakat banyak menggunakan fasilitas ini tentu akan berdampak buruk kepada penghasilan angkutan umum. Untuk itu diperlukannya pembahasan yang khusus untuk mencari solusi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Keempat, Dampak Pergeseran Lokasi Tujuan dimana proses pergerakan masih dapat dilakukan pada lokasi, waktu, dan moda transportasi yang sama tetapi dengan lokasi tujuan yang berbeda. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: Upaya mengarahkan pembangunan tata guna lahan dan Penyebaran secara lebih merata lokasi pusat kegiatan utama dan rayonisasi sekolah di daerah perkotaan. Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mulai memisahkan pusat pemerintahannya ke Gulai Bancah, letaknya yang nyaman, aman dan mempunyai ruas jalan yang lebar. Tujuannya dipindahkan agar membagi lokasi pusat kegiatan utama seperti di Jalan Perwira agar lebih merata dan tidak menumpu pada satu titik lokasi itu saja. Kegiatan ini juga berdampak kepada mengurangi akses transportasi ke satu pusat kegiatan dan menyebar ke Gulai Bancah. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sudah banyak di bangun di daerah Bay Pass seperti ruko-ruko masyarakat pada umumnya untuk berdagang. Dampaknya terhadap pemindahan pertumbuhan ekonomi tersebut gerak arus

transportasi tidak bertumpu di titik itu saja seperti di Pasar Aur Kuning tetapi telah menyebar ke Bypass tentu akan mengurangi terjadinya kemacetan dan berpengaruh baik kepada pengelolaan Manajemen Transportasi di Kota Bukittinggi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan. Tujuan kegiatan ini diadakan agar mengurangi penumpukan kemacetan di titik-titik tempat anak sekolah bersekolah, ini akan berdampak kepada pengelolaan Manajemen Transportasi di Kota Bukittinggi untuk mengurangi kemacetan di titik tertentu. Dan agar pemerataan anak-anak sekolah dibagi sama banyak tidak hanya condong ke sekolah di satu sekolah saja. Konsep transportasi ketika ada zaman rayonisasi administrasi sekolah bahwa mendekatkan orang dengan tempat tujuan tentu itu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan transportasi.

Kebijakan rayon ini merupakan kebijakan yang pada intinya mengurangi waktu orang berkendara di jalanan sehingga mendekatkan siswa dengan sekolahnya yang akan memperpendek jarak tempuh untuk bersekolah. Rayonisasi ada karena mendekatkan orang dengan tempat tujuan dan mempermudah waktu berkendara di jalan sehingga tidak membuat kendaraan menumpuk di suatu titik dan di pusat sekolah sekolah yang akan menuju kota. Ini merupakan salah satu strategi yang telah dilaksanakan oleh Kota Bukittinggi dalam mengatasi untuk mengurangi kemacetan pada saat aktifitas bersekolah.

Penutup

Dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen Transportasi Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi pada dasarnya berjalan baik. Dapat dilihat dari beberapa faktor seperti penyediaan sarana, prasarana, SDM yang berkaitan dengan proses jalannya manajemen transportasi di Kota Bukittinggi. Tanpa adanya factor-faktor tersebut tentu akan memperburuk

kondisi Manajemen Transportasi Kota Bukittinggi. Kemudian dalam pelaksanaan Manajemen Transportasi menggunakan konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi menurut pemikiran Ofyar Z Tamin telah berjalan mulai dari dampak pergeseran waktu, dampak pergeseran rute atau lokasi, dampak pergeseran moda dan dampak pergeseran lokasi tujuan.

Namun dalam pelaksanaan Manajemen Transportasi menggunakan pemikiran Ofyar Z Tamin, masih mengalami kendala. Sebaiknya Pemerintah Kota Bukittinggi membuat dan menetapkan usulan peraturan mengenai dampak pergeseran waktu agar kegiatan ini berjalan baik dan dapat mengurangi kemacetan di titik-titik tertentu. Kemudian dalam pemanfaatan pelayanan angkutan umum sebaiknya Pemerintah Kota Bukittinggi segera menyediakan fasilitas penunjang seperti *car pooling* dan Sistem angkutan umum massa, fasilitas ini juga sangat berguna dalam mengurangi kemacetan di Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi sebaiknya juga memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan wisatawan seperti penyediaan angkutan khusus untuk mengangkut wisatawan dari tempat gedung parkir ke objek wisata yang akan dituju. Dan pemerintah seharusnya membuat aturan agar masyarakat mematuhi segala peraturan yang di buat khususnya Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan memanfaatkan dengan baik fasilitas penunjang transportasi yang disediakan.

Daftar Pustaka

- Fidel Miro. 2005. *“Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi”*, Jakarta: Erlangga.
- Nasution. 2008. *“Manajemen Transportasi”*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ofyar Z. Tamin. 2000. *“Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, Edisi Kedua”*, Bandung: ITB Bandung.
- Ofyar Z. Tamin. 2016. *“Perencanaan dan Pemodelan Transportasi”*, Bandung : ITB.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.